

# TGB Zainul Majdi Menolak Propaganda Khilafah ala HTI

written by Dr. (c) Khalilullah, S.Ag., M.Ag.

**TGB: Saya Tidak Mendukung Ide Khilafah**



**Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi, MA**  
Doktor Tafsir Universitas Al-Azhar-Kairo  
Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar

Sumber: Postingan Instagram Resmi  
@tuangurubajang (23 Oktober 2018)

Negara bangsa ini bagi saya adalah amanah dari ALLOH yang wajib dijaga dan dikokohkan. Inilah kesepakatan kita sejak era para pendiri bangsa. Karena itu saya tidak mendukung ide khilafah. . .

Saya meyakini, Islam tidak memerintahkan satu sistem pemerintahan tertentu, namun memberi panduan nilai-nilai mulia yang harus terwujud dalam sistem apapun. Sistem republik demokratis yang kita sepakati dalam NKRI tak kalah valid dan sahnya dibanding sistem khilafah. . .

Karena nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Islam telah ada, utamanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, syura dan keadilan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa. . .

Bagi saya, NKRI adalah masalah nyata, sedangkan khilafah adalah masalah prediktif. Kaidah mengatakan, *al-maslahah al-mutahaqqiqah an-naajizah muqaddamah 'alal maslahah al-mustaqbalah al-marjuhah*. Masalah nyata, jelas dan telah terwujud, didahulukan diatas masalah prediktif yang belum terwujud. . .

[www.panrita.id](http://www.panrita.id) Panrita Institute Panrita ID Panrita ID

[Isu khilafah](#) bukan sesuatu yang baru dan asing terdengar di benak banyak orang, tak terkecuali di benak orang-orang Indonesia. Saya sendiri mendengar istilah khilafah semenjak duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (setara SMP) dulu, karena kebetulan guru sejarah menjelaskan sejarah Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Saya sama sekali belum mengetahui pergulatan isu khilafah ini lebih serius.

Begitu saya sudah membaca beberapa buku dan informasi yang tersebar di media sosial, tak terkecuali di koran cetak, ternyata khilafah menjadi isu yang cukup sensitif di penjuru dunia, terlebih di Negara Indonesia. Khilafah ini, kalau Anda belum tahu, adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia. Sedang, orangnya disebut dengan “khalifah”.

Sistem khilafah masuk ke Indonesia melalui kelompok radikal. Sebut saja, HTI dan ISIS. Semakin ke depan isu khilafah semakin memicu konflik yang berkepanjangan. Apalagi akhir-akhir ini terjadi percekocokan antara banser dan seorang ustadz karena persoalan khilafah. Singkat ceritanya, banser meminta klarifikasi kepada Ustadz Zainullah Muslim yang tercium dakwahnya berbau pro-khilafah. Percekocokan ini menjadi *trending* di jagat media sosial.

Terlepas dari pro-kontra sikap banser yang “sok pancasilais” dan tak terkendali berkata-kata kasar di depan orang yang tidak disukai, saya bagaimanapun tetap tidak menerima khilafah menjadi sistem negara di Indonesia. [Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi, MA](#) menyebutkan, NKRI adalah maslahat nyata, sedangkan khilafah adalah maslahat prediktif. Disebutkan dalam kaidah: *Al-Mashlahah al-mutahaqqiqah an-najizah muqaddamah ala al-mashlahah al-mustaqbalah al-marjuhah*. Maksudnya kurang lebih begini, “Maslahat nyata, jelas, dan telah terwujud didahulukan di atas maslahat prediktif yang belum terwujud.”

Kaidah yang dinukil oleh TGB memiliki relevansi yang kuat untuk menolak sistem khilafah yang diyakini oleh kelompok radikal sebagai sistem terbaik dibandingkan sistem yang lain, apalagi sampai mengikutsertakan Islam untuk menjustifikasi sistem ini dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Sistem republik yang digunakan di Indonesia dipandang lebih baik dan telah terwujud untuk merangkul perbedaan yang terbentang luas di Indonesia. Jika sistem khilafah ini masih dipaksakan untuk mengganti sistem republik, mampukah sistem khilafah merangkul perbedaan agama? Bukankah sistem khilafah itu hanya memiliki batasan yang sempit dan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, sementara di Indonesia terdapat agama di luar Islam, seperti Kristen, Hindu, dan seterusnya?

TGB meyakini, Islam tidak memerintahkan satu sistem pemerintahan tertentu, namun memberi panduan nilai-nilai mulia yang harus terwujud dalam sistem apapun. Sistem republik demokratis yang disepakati dalam NKRI tak kalah valid dan sah dibandingkan dengan sistem khilafah. Argumentasi TGB ini secara tegas bermaksud menjaga NKRI dari pemuja khilafah yang bermaksud memporak-poranda Indonesia. Tindakan porak-poranda ini tak ubahnya penjajahan yang pernah dilakukan oleh Belanda dan Jepang tempo dulu. Duh, jahat *banget* para pemuja khilafah ini ya!

TGB menolak sistem khilafah menggantikan sistem republik karena, selain alasan sistem khilafah bersifat prediktif, menjaga keutuhan negara ini. TGB memandang,

negara bangsa ini adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga dan dikokohkan. Ini merupakan kesepakatan bersama sejak era para pendiri bangsa. Karena itu, tidak perlu menghadirkan sistem baru semacam khilafah. Lebih dari itu, dalam sistem republik sudah terbentang kuat nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Islam, terutama nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, syura, dan keadilan.

Sebagai penutup, tidak perlu menghadirkan sistem khilafah di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apalagi bersikeras menggantikan sistem republik demokratis. Saya pikir, sistem khilafah itu hanyalah bentuk politik sebagian kelompok yang oposisi terhadap pemerintah. Mereka mencari “jalan tikus” untuk memukul keras dari belakang melalui mencari simpati dan dukungan masyarakat. Sebab, bagi mereka, mendapat dukungan dari publik tak ubahnya kata-kata bijak: “Suara rakyat, suara Tuhan”. *Please stop khilafah, because it's bullshit![] Shallallah ala Muhammad.*